

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III



2025

KEPALA

REGINA ARIYANTI, ST

KATA PENGANTAR

Laporan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024-2026. Laporan Capaian Kinerja merupakan bagian untuk tindaklanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat hasil dan capaian perjanjian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada laporan kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan untuk berkelanjutan kebijakan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menuju Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang lebih Profesional dan andal dalam memberikan gambaran dan informasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	5
BAB II PEJANJIAN KINERJA	8
2.1 Indikator Kinerja Utama	8
2.2 perjanjian Kinerja Esselon II	9
2.3 perjanjian Kinerja Esselon III	11
2.4 Program dan kegiatan yang mendukung IKU	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 TW III	39
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 2025 TW III	40
3.6 Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”** dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2025-2026.

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun penting dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021–2026. Pada tahun ini, Bappeda berperan dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan agar seluruh program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Laporan capaian kinerja Bappeda Tahun 2025 disusun sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta sebagai bahan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Penyusunan Rencana Aksi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berdasarkan pada :
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, TLN Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, TLN Nomor 5948);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, TLN Nomor 6187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, TLN Nomor 6388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, TLN Nomor 6396);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, TLN Nomor 5901);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

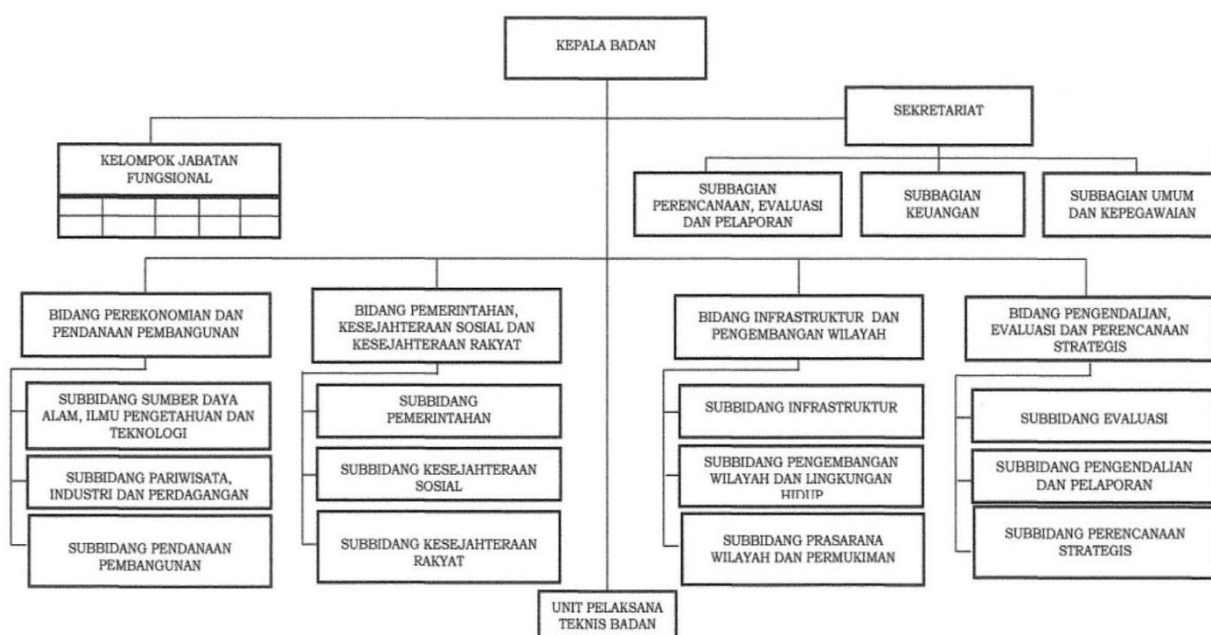
- 1) penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- 2) pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;
- 3) pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- 4) pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- 5) pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 7) penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- 8) penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;

- 9) pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- 10) pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Adapun susunan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 5 (lima) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 15 (lima belas) orang pejabat eselon 4 (empat).

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Peraturan Gubernur Sumber Selatan Nomor 71 Tahun 2016

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin di capai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1. Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional 2. Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	7,30		
2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% -95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

2.2. Perjanjian Kinerja Esselon II

Perjanjian Kinerja di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen yang mengatur kesepakatan antara pimpinan BAPPEDA dan pegawai atau unit kerja di dalam BAPPEDA terkait dengan pelaksanaan tugas, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai selama periode tertentu. Perjanjian ini adalah salah satu instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan utama dari perjanjian kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah, serta untuk memastikan setiap individu atau unit kerja dalam BAPPEDA memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini juga menjadi dasar bagi penilaian kinerja, evaluasi, dan tindak lanjut dalam hal pencapaian atau ketidaktercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari beberapa table berikut :

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	100%	100%	Perjanjian Kinerja periode Januari s.d September Tahun 2025
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80%-95%	61,87%	Perjanjian Kinerja periode Januari s.d September Tahun 2025
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96,55	—	Perjanjian Kinerja Perubahan periode Oktober s.d Desember Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Esselon III

a. Perjanjian Kinerja Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 untuk Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan mencakup sasaran strategis yang berfokus pada Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda, Meningkatnya Realisasi Keuangan Bappeda, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang ASN, serta Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik . Setiap sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yang terukur dengan target yang jelas, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam mendukung pembangunan daerah, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Sekretaris
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	AA (91,63)	–
2	Meningkatnya Realisasi Keuangan Bappeda	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda	98,09%	80,27%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Tinggi	Tinggi
4	Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik	Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal	AA (Sangat Memuaskan)	A Memuaskan

b. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Fokusnya mencakup keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas, partisipasi masyarakat, serta peran akademisi dalam penyusunan RKPD, masing-masing dengan target capaian 100%. Selain itu, ditetapkan pula sasaran peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target capaian 80%-95%.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya keterkaitan antar dokumen perencanaan dan pendanaan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (Renstra OPD, RKPD - RPJMD, RKPD Provinsi - RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD (RPJPN) pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%	
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan	Persentase lokasi pembangunan mitra bidang perekonomian	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
	pembangunan pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang tepat sasaran	dan pendanaan pembangunan yang tepat sasaran		
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah	Persentase program prioritas daerah RKPD yang didanai secara sinergi dan integratif	100%	
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%	
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%	
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam	Persentase capaian perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	

c. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Target yang ditetapkan meliputi keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta masukan akademisi dalam penyusunan RKPD, seluruhnya dengan capaian 100 persen. Selain itu, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra infrastruktur ditargetkan mencapai 80%-95% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	100%	
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian
	pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah yang didanai secara sinergi dan terintegrasi		
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	100%	
5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan Prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat tujuh sasaran strategis. Sasaran tersebut mencakup peningkatan keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD, masing-masing dengan target capaian 100 persen. Selain itu, ditetapkan peningkatan peran akademisi dalam penyusunan RKPD dengan target 100%, pencapaian target program perangkat daerah sebesar 80%, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra dengan target 80%-90% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi,
dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	100%	
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	100%	
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang mendanai secara sinergi dan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian
	Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	integratif		
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang berbasis partisipasi masyarakat	100%	
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	100%	
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi	80%	
7	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat delapan sasaran strategis. Fokusnya diarahkan pada keterkaitan antar dokumen perencanaan, ketepatan lokasi pembangunan, sinergi pendanaan

program prioritas daerah, partisipasi masyarakat, serta kontribusi akademisi dalam penyusunan RKPD dengan capaian target 100 persen. Selain itu, sinkronisasi dokumen SDGs dan integrasi rencana penanggulangan kemiskinan daerah juga ditetapkan dengan target 100 persen, sementara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra ditargetkan 80–95 persen.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat
Bappeda Provinsi Sumatera
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJMD-RPJPD) pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Persentase lokasi pembangunan Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase program prioritas daerah RKPD Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Rasio kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang berbasis partisipasi	100%	100%
5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
6	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
7	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi	100%	100%
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tinggi dan sangat tinggi	80%– 95%	95%

2.4. Perjanjian Kinerja Esselon IV

a. Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan mencakup sasaran strategis yang berfokus pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda, Meningkatnya Realisasi Keuangan Bappeda, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang ASN, serta Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik . Setiap sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yang terukur dengan target yang jelas, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas

pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam mendukung pembangunan daerah, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM BAPPEDA	1.1	Nilai Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi	Tinggi
2	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bappeda	2.1	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	80%	80%
3	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung Operasional Perkantoran	3.1	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung Operasional Perkantoran yang terpenuhi	80%	80%
4	Meningkatnya Nilai SKM	4.1	Pengukuran Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Terlaksananya Forum PD dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan	5.1	Berita Acara Kesepakatan Forum PD dan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	2 Dokumen
6	Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik	6.1	Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal	AA (Sangat Memuaskan)	A (Memuaskan)

b. Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta memastikan tata kelola perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan terukur. Melalui dokumen ini, Kasubbag bertekad melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, responsif, serta selaras dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja
Kasubbag Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	1.1	Nilai Sakip Bappeda	AA (91,63)	-
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bappeda	2.1	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu	100%	70%
3	Terlaksananya Pengelolaan Website dan Media Sosial Bappeda	3.1	Laporan Pelaksanaan Monitoring Website dan Media Sosial Bappeda	1 Laporan	Laporan Media Sosial dan Website Per November
4	Terlaksananya Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda	4.1	Jumlah Laporan Realisasi Program dan Kegiatan	1 Laporan	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Per November

c. Perjanjian Kasubbag Keuangan Sekretariat Bappeda

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kasubbag Keuangan Sekretariat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tugas, fungsi, serta target kinerja yang harus dicapai dalam periode tahun berjalan.

Tabel 2.4.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Sub Bagian Keuangan
Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Keuangan yang Berkualitas	1.1	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAI	81%	71%
2	Meningkatnya Pengendalian Internal Bappeda	2.1	Persentase temuan keuangan terhadap dari pemeriksa terhadap kegiatan di Bappeda pada tahun berjalan	9%	0%
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	3.1	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu dan Akrua	81%	71%

d. Perjanjian Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pejabat Eselon IV pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang terpadu, berkualitas, serta berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 2.4.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Infrastruktur
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RKP urusan infrastruktur	1.1	Persentase program prioritas daerah yang terkait dengan program prioritas nasional urusan infrastruktur	81%	100%
2	Meningkatnya keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan infrastruktur	2.1	Persentase keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan infrastruktur	81%	100%
3	Meningkatnya Keterkaitan Program Prioritas RKPD Provinsi dengan Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan infrastruktur	3.1	Persentase Keterkaitan Program Prioritas RKPD Provinsi dengan Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan infrastruktur	81%	81%
4	Meningkatnya data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis yang diupdate dan divalidasi urusan infrastruktur	4.1	Persentase mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	81%	88%
5	Meningkatnya mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang	5.1	Persentase kegiatan yang dievaluasi kesesuaian dengan kelompok	81%	88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
	sesuai standar urusan infrastruktur		sasarannya		
6	Meningkatnya mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	6.1	Persentase mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	81%	88%
7	Meningkatnya jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan infrastruktur	7.1	Persentase jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan infrastruktur	20%	20%
8	Meningkatnya usulan kegiatan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan infrastruktur	8.1	Jumlah usulan APBD urusan infrastruktur	50%	74%
9	Meningkatnya pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan infrastruktur	9.1	Jumlah pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan infrastruktur	3 Usulan (Jalan, Sumber Daya Air, dan Perhubungan)	3 Usulan
10	Adanya keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam proses musrenbang Provinsi urusan infrastruktur	10.1	Persentase pemerintah kab/kota yang terlibat dalam musrenbang urusan infrastruktur	1 rekomendasi arah kebijakan	1 Rekomendasi
11	Meningkatnya keterlibatan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan	11.1	Jumlah rekomendasi akademisi melalui FGD perencanaan urusan	4 masukan	4 Masukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
	urusan infrastruktur		infrastruktur		

- e. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam perencanaan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tugas, target kinerja, dan tanggung jawab yang harus dicapai sepanjang tahun berjalan.

Tabel 2.4.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat	1.1	Persentase realisasi koordinasi yang direncanakan	81%	100%
		1.2	Persentase jumlah rapat yang dihadiri	90%	100%
2	Sinkronisasi tujuan Renja OPD dengan Renstra OPD	2.1	Persentase Renja OPD sesuai dengan Renstra	50%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
3	Sinkronisasi sasaran Renja OPD dengan Renstra OPD	3.1	Persentase Renja OPD sesuai dengan Renstra	17%	100%
4	Tersedianya panduan yang baik untuk penetapan lokasi kegiatan	4.1	Jumlah Panduan untuk penetapan lokasi kegiatan	1	1
5	Meningkatnya kualitas proses evaluasi lokasi kegiatan	5.1	Persentase kegiatan yang sesuai dengan lokasi	81%	81%
6	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	6.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis	70%	100%
7	Meningkatnya kualitas keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi	7.1	Persentase usulan Pemerintah Kab/Kota yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	70%	100%
8	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi	8.1	Jumlah rekomendasi akademisi yang diakomodir dalam RKPD	1 rekomendasi arah kebijakan	1 rekomendasi arah kebijakan

- f. Perjanjian Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Kepala Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan pengembangan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan merata. Dokumen ini menjadi landasan pelaksanaan tugas, fungsi, serta target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan.

Tabel 2.4.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RKP urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	1.1	Persentase program prioritas yang terkait dengan program prioritas nasional urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	81%	100%
2	Meningkatnya Keterkaitan Program Prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	2.1	Persentase Keterkaitan Program Prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya Keterkaitan Program prioritas RKPD Provinsi dengan Program prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	3.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Kabupaten/Kota dengan RKPD Provinsi urusan prasarana wilayah dan Permukiman	81%	100%
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis yang di update dan divalidasi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	4.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis yang telah di update dan di validasi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%	80%
5	Meningkatnya mekanisme evaluasi kelompok data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis yang di update dan divalidasi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	5.1	Persentase mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar yang sudah dilaksanakan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%	74%
6	Meningkatnya mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan	6.1	Persentase mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar yang sudah dilaksanakan urusan	81%	81%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
	Prasarana Wilayah dan Permukiman		Prasarana Wilayah dan Permukiman		
7	Meningkatnya jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan prasarana wilayah dan permukiman	7.1	Presentase jumlah APBN yang dialokasikan untuk Sumatera Selatan urusan prasarana wilayah dan permukiman	20%	20%
8	Meningkatnya Usulan Kegiatan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	8.1	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	50%	50%
9	Meningkatnya pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	9.1	Jumlah kelompok usulan pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	3 kelompok usulan	3 kelompok usulan
10	Adanya keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam proses Musrenbang Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	10.1	Jumlah Rekomendasi Pemerintah Kab/Kota dalam proses Musrenbang Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	1 rekomendasi arah kebijakan	1 rekomendasi arah kebijakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
11	Meningkatnya keterlibatan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	11.1	Jumlah masukan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	3 masukan	2 masukan

- g. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai komitmen Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penyusunan pelaporan kinerja yang akuntabel, terukur, dan tepat waktu. Dokumen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi pada tahun berjalan.

Tabel 2.4.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Tercapainya Target Kegiatan OPD Provinsi	1.1	Persentase Kegiatan OPD provinsi yang mencapai target	80%-100%	85%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya kualitas hasil evaluasi RKPD Provinsi	2.1	Presentase OPD yang mendapat rekomendasi perbaikan kinerja target program	1%-5%	2%
3	Tercapainya Target Perjanjian Kinerja OPD	3.1	Persentase OPD yang mencapai target perjanjian kinerja	80%-100%	85%

- h. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Evaluasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, terutama terkait pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi landasan pelaksanaan tugas, target kinerja, serta ruang lingkup tanggung jawab yang harus dicapai pada tahun berjalan.

Tabel 2.4.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Evaluasi
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kualitas hasil Evaluasi RKPD Provinsi	1.1	Persentase OPD yang mendapat rekomendasi perbaikan kinerja target program	80%	80%

2	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Sub Bidang Evaluasi	2.1	Persentase Rata-rata Keterkaitan Prioritas Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Sub Bidang Evaluasi	85%	85%
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota	3.1	Persentase RKPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai Standar	80%	80%

- i. Perjanjian Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Kepala Subbidang Perencanaan Strategis dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait penyusunan, pengembangan, dan penyelarasan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta target kinerja yang akan dicapai sepanjang tahun berjalan.

Tabel 2.4.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Perencanaan Strategis
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	1.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	88%	88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD	2.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD	88%	88%
3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	3.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	88%	88%
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	4.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis	88%	88%
5	Meningkatnya rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi	5.1	Jumlah rekomendasi dan masukan akademisi	80%	80%
6	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan yang sesuai penyusunan RKPD Provinsi	6.1	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi	88%	88%
7	Tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu	7.1	Persentase tahapan proses penyusunan RKPD Provinsi	80%	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
			Sesuai Kalender Perencanaan		

- j. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tugas, fungsi, serta target kinerja yang harus dicapai dalam tahun berjalan.

Tabel 2.4.9
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial
Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Keterkaitan antar dokumen perencanaan pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	1.1	Persentase Rata-Rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP-RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD-RPJPN) pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan pembangunan pada mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	2.1	Persentase lokasi pembangunan mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	100%	100%
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	3.1	Persentase program prioritas daerah RKPD pada mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	100%	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	4.1	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	100%	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	5.1	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial	100%	100%
6	Meningkatnya sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan	6.1	Persentase Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
	Provinsi Sumatera Selatan				
7	Meningkatnya sinkronisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	7.1	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan	100%	100%
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Kesejahteraan Sosial	8.1	Persentase Capaian Perangkat Daerah Mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	80-95%

k. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, terutama di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja sepanjang tahun berjalan.

Tabel 2.4.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Keterkaitan antar dokumen perencanaan pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	1.1	Persentase Rata-Rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP-RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD-RPJPN)pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan pembangunan pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2.1	Persentase lokasi pembangunan Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	100%	100%
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	3.1	Persentase program prioritas daerah RKPD pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	4.1	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	5.1	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
6	Meningkatnya sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	6.1	Persentase Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%
7	Meningkatnya sinkronisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	7.1	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan	100%	100%
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Kesejahteraan Rakyat	8.1	Persentase Capaian Perangkat Daerah Mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	80-95%

1. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Pemerintahan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kelembagaan, politik, dan ketenteraman masyarakat. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tugas, target, serta ruang lingkup tanggung jawab yang harus dicapai sepanjang tahun berjalan.

Tabel 2.4.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Keterkaitan antar dokumen perencanaan pada Mitra Subbidang Pemerintahan	1.1	Persentase Rata-Rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP-RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD-RPJPN) pada Mitra Subbidang Pemerintahan	100%	100%
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan pembangunan pada Mitra Subbidang Pemerintahan	2.1	Persentase lokasi pembangunan Mitra Subbidang Pemerintahan yang tepat sasaran	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah pada Mitra Subbidang Pemerintahan	3.1	Persentase program prioritas daerah RKPD pada Mitra Subbidang Pemerintahan	100%	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD pada Mitra Subbidang Pemerintahan	4.1	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Subbidang Pemerintahan	100%	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada Mitra Subbidang Pemerintahan	5.1	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Subbidang Pemerintahan	100%	100%
6	Meningkatnya sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	6.1	Persentase Dokumen Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%
7	Meningkatnya sinkronisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dengan dokumen	7.1	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
	perencanaan Provinsi Sumatera Selatan		yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan		
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan	8.1	Persentase Capaian Perangkat Daerah Mitra Subbidang Pemerintahan yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%	80-95%

m. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis bidang perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sektor pariwisata, industri, dan perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan. Sepanjang tahun berjalan, Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan berperan dalam memastikan proses penyusunan dokumen perencanaan sektoral terlaksana secara terukur, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Tabel 2.4.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan
Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RPJPD dengan RKP pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	1.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKP dengan RKP pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	2.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	3.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
4	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJPN pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	4.1	Presentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJPN pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
			Perdagangan		
5	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	5.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
6	Tersedianya sumber pendanaan pada Sektor Perdagangan	6.1	Persentase Alokasi APBD, APBN, DAK yang tersedia pada Mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	7.1	Presentase kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	100%	100%
8	Meningkatnya rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	8.1	Presentase rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra subbid Pariwisata, Industri dan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
			Perdagangan		
9	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Provinsi Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	9.1	Persentase Capaian Perangkat Daerah Mitra Subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	80-95%	80-95%

- n. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai wujud komitmen Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan IPTEK dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang perekonomian dan pengelolaan potensi daerah. Subbidang SDA dan IPTEK memiliki peran strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan sektor sumber daya alam, lingkungan, energi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terselenggara secara terarah, berkelanjutan, dan sesuai prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.4.12
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang SDA dan IPTEK
Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	1.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	2.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	3.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
4	Meningkatnya keterkaitan Prioritas Pembangunan antara RPJPD dengan RPJPN pada Mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	4.1	Persentase keterkaitan Prioritas Pembangunan antara RPJPD dengan RPJPN pada Mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	5.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
6	Tersedianya sumber pendanaan mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	6.1	Persentase Alokasi APBD, APBN, DAK yang tersedia mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	7.1	Persentase Kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
8	Meningkatnya rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	7.1	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
9	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada Mitra Subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	8.1	Persentase capaian perangkat daerah pada Mitra Subbid SDA dan IPTEK Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	80-95%	80-95%

- o. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada aspek penguatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Subbidang Pendanaan Pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan tersusunnya perencanaan pendanaan yang akuntabel, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan prioritas daerah.

Tabel 2.4.13
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan
Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	1.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	2.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	3.1	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	4.1	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
5	Tersedianya sumber pendanaan pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	5.1	Persentase Alokasi APBD, APBN, DAK yang tersedia pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	6.1	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	100%	100%
7	Meningkatnya masukan dan rekomendasi akademisi dan stakeholder terkait dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	7.1	Persentase masukan dan rekomendasi akademisi dan stakeholder terkait pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	5
			Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan		
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	8.1	Pesentase capaian perangkat daerah pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	81%	81%

2.5. Program dan kegiatan yang mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Bappeda Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.33
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	100.00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	85.39
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	85.33

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,236,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	98.19
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	75.81
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,550,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	100.00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100.00
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45,320,000	Kota Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	82.13
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.00
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	90.00
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	72.53

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	72.74
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	90.00
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0.00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	77.63
16	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	87.09
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,048,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.00
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	68.16
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	Kota Palembang			0.00
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,514,000,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	84.91
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	84.61
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	100.00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	83.28
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1,209,281,390	Kota Palembang	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	90.26

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,000,000	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	91.30
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243,588,340	Kota Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor)	92.70
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735,693,050	Kota Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	89.13
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	2,847,848,693	Kota Palembang	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	95.92
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,603,754,700	Kota Palembang	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	96.49

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	178,494,238	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	98.32
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	62,293,638	Kota Palembang	Jumlah Telahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	100.00
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	531,600,000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029)	100.00
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	831,366,824	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029	93.59

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192,923,105	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	100.00
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167,949,000	Kota Palembang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	100.00
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24,974,105	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)	100.00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	94.29

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	98,076,250	Kota Palembang	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	100.00
35	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	100.00
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	80.77
37	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada Rkpd Kab/Kota 2026, 1 Dok Fasilitasi Raperkada Rkpd Perubahan 2025 Kab/Kota, 1 Dok Fasilitasi Ranwal Ranperda Rpjmd	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
					Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Fasilitasi RAPERDA RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota, 1 Dok Hasil Penilaian Ppd Kab/Kota)	
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi	0,00
38	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah	1 Dokumen	0,00
39	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah		Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah	1 Dokumen	0,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,883,428	Kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	98.10

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	96.64
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.00
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,250,564	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,460,296	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95,654,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178,490,399	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	83.19
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,470,613	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100.00
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58,670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325,691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	100.00
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	100.00
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	100.00
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52,097,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	100.00
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	100.00
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,597,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100.00
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,203,802	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100.00
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74,155,390	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	100.00
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	768,628,112	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	98.09

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,926,125	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	100.00
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72,391,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	100.00
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82,426,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	96.73
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89,956,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/R PJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	148,991,422	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	98.32
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84,158,750	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	97.03
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	82,356,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/R PJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)	94.42
	Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan	38,387,144,866				86.03

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sedangkan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator 1 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase kesesuaian sasaran antar dokumen dipakai untuk tahun 2025 dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 100%. Indikator 2 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 61,87%.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Capaian
1		2	3	4	5
1.	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%

2.	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% - 95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	61,87%
----	---	---	-----------	---	--------

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap posisi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian kinerja secara nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja daerah berada di atas, setara, atau di bawah rata-rata nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengambilan kebijakan pembangunan pada periode selanjutnya.

Pada RPJMD tahun 2025-2029 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyesuaikan Indikator baru yang menjadi unsur urusan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Urusan nasional. Perbandingan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Kinerja	Realisasi Capaian Nasional 2024	2024		2025		Keterangan
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	7	7	-	-	Tahun 2025 Indikator Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak

							digunakan dan di ganti dengan indikator baru
2	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	-	100%	100%	100%	100%	Sampai dengan triwulan ketiga indikator Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan mencapai 100%
3	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	-	80%-95%	87,78%	80%-95%	61,87%	Sampai dengan triwulan ketiga indikator Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi mencapai 61,87%
4	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	98,68		96,51	96,55	-	Indikator baru yang menyesuaikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Rencana Aksi merupakan

salah satu bentuk *instrument* pertanggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan Rencana Aksi adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukur, mengevaluasi dan menilai kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA PENGUKURAN ORIGINAL			
			Sangat Berhasil 85 s.d 100	Berhasil 70 s.d.85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Sangat Berhasil	-	-	-

2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	61,87%	Sangat Berhasil	-	-	-
---	--	--------	-----------------	---	---	---

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata Tahun 2025 sebesar -. Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

Tabel. 3.3
Pencapaian Sasaran 1 Indikator 1
(Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
dalam Perubahan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sumatera
Selatan 2024 – 2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persen	100	100	100%

Pencapaian Sasaran 1 indikator 1 sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Tingginya capaian ini disebabkan karena dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan *program follow result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Secara persentase capaian terhadap sasaran 1 indikator 1 tersebut menunjukkan capaian dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran 2 Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	80-95 %	75,25%	61,87%

Indikator kinerja Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi terealisasi mencapai 70% di triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.5
Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1.	Diatas 85	Sangat Berhasil	1
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	-

3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	1
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
Jumlah			2

3.6 Realisasi Anggaran

Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 38.387.144.866,- dengan Realisasi anggar per 1 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp. 23,023,783,695.00,- atau sebesar 59.98%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6**Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	86.46	84.33	20,975,395,808.00	63.20	76.06	68.26	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0.37	100.00	44,539,402.00	31.59	70.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	0.37	100.00	44,539,402.00	31.59	70.00	0.26	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	68.47	85.39	18,467,113,067.00	70.27	84.50		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	66.88	85.33	18,069,437,887.00	70.39	85.00	56.84	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,236,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi + 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	0.70	98.19	241,142,000	89.57	95.00	0.67	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0.74	75.81	127,254,000.00	44.94	78.00	0.58	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,550,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0.15	100.00	29,279,180.00	50.88	80.00	0.12	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	0.38	100.00	98,730,750.00	67.94	100.00		
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45,320,000	Kota Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.26	100.00	98,730,750.00	98.73	100.00	0.26	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	1.33	82.13	140,734,338.00	27.55	82.50		
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.17	100.00	39,505,051.00	59.14	80.00	0.14	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0.22	100.00	78,439,000.00	94.40	95.00	0.21	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0.12	90.00	22,790,287.00	50.65	70.00	0.08	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0.82	72.53	0.00	0.00	85.00	0.70	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	8.82	72.74	743,312,072.00	21.95	60.00		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.52	90.00	158,687,000.00	79.34	85.00	0.44	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	1.32	77.63	171,380,701.00	33.79	75.00	0.99	
16	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0.50	87.09	95,148,000.00	49.14	70.00	0.35	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,048,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	2.05	100.00	300,859,921.00	38.28	65.00	1.33	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	0.61	68.16	17,236,450.00	7.37	65.00	0.40	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	Kota Palembang			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,514,000,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	3.94	84.91	947,322,240.00	62.57	68.75		
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	0.03	100.00	3,002,900.00	30.03	55.00	0.01	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	2.14	84.61	520,069,340.00	63.27	75.00	1.61	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	0.19	100.00	39,000,000.00	54.17	70.00	0.13	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	1.59	83.28	385,250,000.00	63.16	75.00	1.19	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1,209,281,390	Kota Palembang	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	3.15	90.26	533,643,939.00	44.13	66.67	2.10	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,000,000	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	0.60	91.30	82,688,091.00	35.95	60.00	0.36	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243,588,340	Kota Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor)	0.63	92.70	158,003,620.00	64.87	85.00	0.54	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735,693,050	Kota Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1.92	89.13	292,952,228.00	39.82	55.00	1.05	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	2,847,848,693	Kota Palembang	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	7.42	95.92	1,288,937,876.00	45.26	64.72	5.55	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,603,754,700	Kota Palembang	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	4.18	96.49	894,270,225.00	55.76	77.50		
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	178,494,238	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	0.46	98.32	0.00	0.00	25.00	0.12	
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	62,293,638	Kota Palembang	Jumlah Telahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	0.16	100.00	19,786,200.00	31.76	100.00	0.16	
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	531,600,000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBA NG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBA NG RPJMD 2025-2029)	1.38	100.00	460,537,700.00	86.63	100.00	1.38	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	831,366,824	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029	2.17	93.59	413,946,325.00	49.79	85.00	1.84	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192,923,105	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0.50	100.00	61,419,830.00	31.84	50.00		
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167,949,000	Kota Palembang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	0.44	100.00	61,419,830.00	36.57	50.00	0.22	
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24,974,105	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Infrastruktur)							
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	2.74	94.29	333,247,821.00	31.70	66.67		
34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	98,076,250	Kota Palembang	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	0.26	100.00	32,132,260.00	32.76	60.00	0.15	
35	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0.13	100.00	4,076,700.00	8.45	20.00	0.03	
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0.81	80.77	115,901,520.00	37.15	70.00	0.57	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 DOKUMEN (1 DOK FASILITASI RANPERKAD A RKPD KAB/KOTA 2026, 1 DOK FASILITASI RAPERKADA RKPD PERUBAHAN 2025 KAB/KOTA, 1 DOK FASILITASI RANWAL RANPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI RAPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KAB/KOTA, 1 DOK HASIL PENILAIAN PPD KAB/KOTA)	1.54	100.00	181,137,341.00	30.55	70.00	1.08	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,883,428	Kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	6.12	98.10	759,450,011.00	32.30	57.71	3.69	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.32	96.64	252,922,054.00	28.35	57.50		

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.16	100.00	13,217,710.00	21.53	60.00	0.10	
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,250,564	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.14	100.00	5,200,000.00	9.41	55.00	0.08	
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,460,296	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.15	100.00	2,150,484.00	3.68	50.00	0.08	
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95,654,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.25	100.00	5,192,000.00	5.43	55.00	0.14	
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178,490,399	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	0.46	83.19	30,061,410.00	16.84	55.00	0.26	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RKPD)								
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,470,613	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100.00	6,420,000.00	10.98	60.00	0.09	
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58,670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100.00	13,125,000.00	22.37	60.00	0.09	
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325,691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	0.85	100.00	177,555,450.00	54.52	65.00	0.55	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1.80	100.00	237,319,895.00	34.39	57.50		
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	0.62	100.00	138,535,971.00	58.67	70.00	0.43	
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52,097,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	0.14	100.00	3,396,600.00	6.52	50.00	0.07	
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	0.54	100.00	60,591,221.00	29.17	65.00	0.35	
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	0.08	100.00	13,100,985.00	41.83	65.00	0.05	
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,597,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,203,802	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.07	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74,155,390	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	0.19	100.00	21,695,118.00	29.26	60.00	0.12	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	768,628,112	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.00	98.09	269,208,062.00	35.02	58.13		
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,926,125	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	0.22	100.00	2,709,000.00	3.27	60.00	0.13	
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72,391,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.19	100.00	16,458,440.00	22.74	55.00	0.10	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82,426,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.21	96.73	22,309,100.00	27.07	55.00	0.12	
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89,956,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD /RKP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0.23	100.00	51,288,799.00	57.02	60.00	0.14	
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	148,991,422	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0.39	98.32	41,266,759.00	27.70	55.00	0.21	
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84,158,750	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	0.22	97.03	33,484,368.00	39.79	55.00	0.12	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	82,356,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0.21	100.00	5,692,496.00	6.91	50.00	0.11	
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD /RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur ; Jumlah Laporan yang disusun)	0.33	94.42	95,999,100.00	76.54	75.00	0.25	
	Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan	38,387,144,866				100.00	86.03	23,023,783,695.00	59.98	66.16	77.50	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 di Triwulan III dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di Tahun keempat Periode Renstra 2025-2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian indikator sasaran BAPPEDA Tahun 2025 masuk dalam kategori belum berhasil (periode triwulan III).

4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun *non* formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik *intern* maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
5. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur

pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, Oktober 2025
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003